

## ABSTRAK

Dalam paham kedaulatan rakyat (demokrasi), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahan. Tetapi dalam kehidupan sekarang yang ditandai dengan tingkat kehidupan yang kompleks dan dinamis, tingkat kecerdasan masyarakat yang tidak merata, dan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan cenderung semakin tajam, Sektor daerah merupakan bagian penting untuk menunjang pekerjaan pemerintahan pusat dan juga mensejahterakan masyarakat di daerah dan proses pemilihan pemimpin daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dilaksanakan melalui pilkada yang di atur pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Di sisi yang lain perkembangan teknologi dirasakan semakin pesat, konsep perkembangan teknologi, selalu bertujuan untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari, terutama dalam memecahkan berbagai masalah pada kehidupan. Teknologi juga dapat dimasukkan ke dalam suatu sistem yang sudah ada, bermaksud untuk meminimalisir kekompleksitasan serta mengoptimalkan segala segi yang ada pada sistem tersebut. Salah satunya yaitu pemakaian teknologi pada sistem pemilihan umum. Oleh karena itu, timbul rumusan permasalahan: Bagaimanakah Pengaturan tentang sistem *e-voting* berdasarkan Asas dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia untuk menjadi *ius constituendum* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan urgensi penerapan sistem *e-voting* yang ideal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan penyelenggaraan sistem elektronik. Semua data yang dihimpun kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis ini juga memasukkan dan mengkombinasikan dengan asas-asas Pemilihan Kepala Daerah yang termaktub di dalam konstitusi dan juga di dalam konsep Negara Hukum serta pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik. Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa penggunaan sistem pemungutan suara secara elektronik telah sesuai dengan kerangka hukum Indonesia, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009, serta Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga permasalahan yang ada pada *Status Quo* dengan sistem konvensional bisa dimitagsi dengan sistem *e-voting* dengan pemanfaatan teknologi.

**Kata Kunci :** *Konstitusionalitas, E-voting, Pilkada.*

## **ABSTRACT**

*In the notion of popular sovereignty (democracy), it is the people who are considered as the owners and holders of the highest authority in a country. It is the people who determine the pattern and the way the government is organized. It is the people who determine the goals to be achieved by the state and government. But in today's life which is characterized by a complex and dynamic level of life, the level of intelligence of society is not evenly distributed, and the level of specialization between work sectors tends to be sharper, the regional sector is an important part of supporting the work of the central government and also the welfare of the people in the regions and the process of selecting leaders. regional elections (Governors, Regents and Mayors) are carried out through local elections which are regulated in Law Number 6 of 2020. On the other hand, technological developments are felt to be increasing rapidly, the concept of technological development, always aims to help everyday human life, especially in solving various problems in life. Technology can also be incorporated into an existing system, intending to minimize complexity and optimize all aspects of the system. One of them is the use of technology in the general election system. Therefore, the formulation of the problem arises: How is the regulation regarding the e-voting system based on principles in regional head elections in Indonesia to become an ius constituendum in regional head elections in Indonesia and the urgency of implementing an ideal e-voting system in regional head elections in Indonesia? To answer these problems, this study uses a sociological juridical approach with data collection methods through library research related to regional head elections and the implementation of electronic systems. All data collected was then analyzed qualitatively. This analysis also incorporates and combines with the principles of regional head elections as stipulated in the constitution and also in the concept of a rule of law and legal responsibility for administering electronic systems. From the results of this study it was answered that the use of an electronic voting system was in accordance with the Indonesian legal framework, namely Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Constitutional Court Decision No. 147/PUU- VII/2009, as well as Law Number 6 of 2020 concerning regional head elections. So that the problems that exist in the Status Quo with conventional systems can be mitigated with the e-voting system using technology.*

**Keyword :** *Constitutionality, E-voting, Regional Elections.*